

# Mencapai Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan

**Dina Cassa Maharani**

Mahasiswa Program Studi Sarjana Hubungan Internasional  
UPN "Veteran" Jawa Timur

e-mail: dinaamaharani@gmail.com

## ABSTRACT

*Problems and challenges in achieving sustainable Indonesian food security are multi-dimensional including economic, social, political, and environmental aspects. Identification of those problems and challenges can be approached through food supply and demand analysis. From supply side, those challenges, among others, are a stiff competition in the use of natural resources, impacts of global climate change, and the dominance of smallscale farmers in food farming. From demand side, several challenges are the existence of high population growth and its dynamic characteristics, change in food consumers' preference, and competition in demand for food commodities as human consumption, feed, and energy uses. This paper aims to review current condition of Indonesian food security, to analyze challenges faced by this country, and to formulate policy alternatives in achieving sustainable Indonesian food security toward 2025. This analysis found out that in the last six years Indonesia was able to provide enough food to fulfill its people's need, however quality of food consumption of an average Indonesian was under standard dietary pattern recommended by nutritionists. Challenges to achieve sustainable Indonesian food security toward 2025 will be more difficult. To response to the challenges, this article recommends some adjustment on policy direction of food security development, especially related to defining goals, choosing means and ways in achieving the goals, and setting targets of food security development.*

**Keywords:** sustainable food security, food demand and supply dynamics, policy direction changes

*Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Identifikasi permasalahan dan tantangan tersebut dapat dilakukan melalui analisis penawaran dan permintaan pangan. Dari sisi penawaran, tantangan tersebut diantaranya berupa persaingan pemanfaatan sumber daya alam, dampak perubahan iklim global, dan dominasi usahatani skala kecil. Dari sisi permintaan, diantara tantangan tersebut adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografinya, perubahan selera konsumen, dan persaingan permintaan komoditas pangan untuk konsumsi manusia, pakan, dan bahan baku energi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini, mengkaji tantangan yang akan datang, dan merumuskan alternatif kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan menuju 2025. Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa selama enam tahun terakhir secara makro Indonesia mampu menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya, namun kualitas konsumsi pangan rata-rata masyarakat Indonesia masih di bawah rekomendasi para ahli gizi. Tantangan menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan tahun 2025 akan semakin berat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dalam artikel ini disarankan perlunya dilakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan, khususnya dalam menetapkan tujuan, memilih cara mencapai tujuan, dan menentukan sasaran ketahanan pangan nasional.*

**Kata kunci:** ketahanan pangan berkelanjutan, dinamika penawaran dan permintaan pangan, perubahan arah kebijakan

## Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan suatu masalah yang bersifat multidimensi dan sangat kompleks, yang mana meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Diantara aspek-aspek berikut, aspek politiklah yang seringkali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan. Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menjadi isu dan agenda prioritas dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan berbagai negara dan lembaga internasional. Berbagai lembaga internasional membahas secara mendalam upaya perwujudan ketahanan pangan, seperti yang dilaksanakan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)* atau Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia, *Asia and the Pacific Economic Cooperation (APEC)*, atau Perkumpulan Negara-Negara Asia Tenggara. Pada berbagai pertemuan tersebut, topik tertentu tentang ketahanan pangan dibahas mendalam, diambil kesepakatan, dan dikeluarkan pernyataan yang menunjukkan pemahaman atas permasalahan dan rekomendasi rancangan penanganannya.

Pada bulan Oktober 2013 di Bali, para pemimpin APEC menyetujui untuk mengimplementasikan *APEC Food Security Road Map Toward 2020* (APEC, 2013a). *Road Map* ini disusun oleh para pejabat public dan perwakilan swasta anggota ekonomi APEC yang tergabung dalam *APEC Policy Partnership on Food Security (APEC-PPFS)*. Pada tahun 2013, organisasi *APEC-PPFS* ini diketuai oleh Indonesia dengan hasil utama tersusunnya *Road Map* tersebut (APEC, 2013b).

Di tingkat ASEAN, pada bulan Oktober 2011 tepatnya di Jakarta, diselenggarakan pertemuan para Menteri Pertanian dan Kehutanan yang menyepakati pembentukan *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)*. Lembaga ini berperan mengelola cadangan beras yang disumbangkan oleh semua negara anggota untuk dimanfaatkan di kawasan ini apabila terjadi keadaan darurat karena bencana alam. *Plus Three* merujuk pada tiga negara selain anggota ASEAN yang menjadi anggota APTERR, yaitu Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan (Suswono, 2011; Briones, 2012)

Di Indonesia sendiri pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, ketahanan pangan menjadi salah satu dari 11 prioritas pembangunan nasional seperti yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 (Bappenas, 2010). Untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan tersebut, Kementerian Pertanian melaksanakan suatu program yang disebut Empat Sukses Pertanian, yang terdiri dari pencapaian swasembada lima komoditas pangan penting, antara lain beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi pada tahun 2014; peningkatan diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah; daya saing dan ekspor komoditas pertanian; dan peningkatan kesejahteraan petani (Kementerian Pertanian, 2010). Dalam prakeknya sendiri, sukses nomer satu selalu menjadi fokus utama dikarenakan peningkatan produksi pangan menjadi kriteria utama keberhasilan Kementerian Pertanian dalam mengemban tugasnya.

Sembilan tahun ke depan, dalam kurun waktu 2016-2025, sejalan dengan kondisi global, negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang diperkirakan akan menghadapi keadaan semakin sulit untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas keberlanjutan ketahanan pangan (FAO, 2011a; Badan Ketahanan Pangan, 2013). Tantangan muncul dari dua sisi sekaligus, yaitu dari sisi *supply* (penawaran, pasokan) dan sisi *demand* (permintaan, kebutuhan) yang berperilaku sangat dinamis.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengevaluasi kondisi ketahanan pangan enam tahun terakhir, menganalisis tantangan yang dihadapi, dan merumuskan alternative kebijakan ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan menuju tahun 2025.

### **Pengertian Ketahanan Pangan**

Definisi atau pengertian ketahanan pangan versi negara Republik Indonesia telah dirumuskan dalam UU Pangan. Dengan mengacu pada berbagai definisi yang berlaku di Indonesia dan di dunia internasional, pihak-pihak terkait yang menyusun UU Pangan merumuskan batasan ketahanan pangan yang di dalamnya merangkum beberapa butir penting antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai tingkat perseorangan; (2) tolok ukur terpenuhinya kebutuhan pangan meliputi berbagai aspek, yaitu: (a) dari sisi kuantitas jumlahnya cukup, (b) dari sisi kualitas mutunya baik, aman dikonsumsi, jenis pangan tersedia beragam, memenuhi kecukupan gizi, (c) dari sisi keamanan pangan rohani, pangan harus tidak bertentangan dengan kaidah agama, keyakinan dan budaya masyarakat, serta (d) dari sisi keterjangkauan ekonomi, pangan tersedia merata ke seluruh pelosok Indonesia dengan harga terjangkau oleh seluruh komponen masyarakat; dan (3) penyediaan dan keterjangkauan pangan ini dimaksudkan agar masyarakat sampai perseorangan dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Definisi ini belum mengindikasikan sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat. Dengan masuknya konsep kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, aspek sumber pangan menjadi salah satu hal yang penting dan strategis yang diatur dalam pasal-pasal pada UU Pangan tersebut, di antaranya pada pasal 14 dan 15. Pasal tersebut mengatur bahwa sumber penyediaan pangan berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Apabila dari kedua sumber tersebut tidak mencukupi, pangan dapat dipenuhi dari impor dengan jumlah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, impor pangan merupakan variabel kebijakan yang sah untuk dimanfaatkan, tetapi harus dirancang dengan cermat melalui perhitungan yang tepat tentang ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, cadangan pangan, dan kebutuhan konsumsi pangan antarwilayah serta nasional. Selain itu, keputusan impor pangan harus benar-benar didasarkan dalam rangka menjaga kepentingan nasional. Dengan kata lain, impor pangan adalah kebijakan terakhir yang dapat diambil (*food import is the last resort*).

Ada tiga hal yang membedakan definisi ketahanan pangan dalam UU Pangan yang baru dengan UU Pangan No. 7 Tahun 1996 (yang lama) yang mana dinyatakan sudah tidak berlaku. *Pertama*, dalam UU Pangan ini keterjangkauan pangan diatur sampai pada tingkat perseorangan, sedangkan dalam UU sebelumnya hanya sampai tingkat rumah tangga. *Kedua*, UU Pangan baru mengakui perlunya aspek keamanan pangan rohani, dengan menambahkan frasa: “tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat”. UU Pangan ini mengakui bahwa bagi umat Islam pangan halal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan dan keamanan pangan.

### **Kinerja Ketahanan Pangan Nasional**

Terdapat tiga subsistem dalam sistem ketahanan pangan, antara lain ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Ada pula beberapa parameter yang digunakan dalam mengukur kinerja ketahanan pangan, namun penulis memilih enam parameter, yaitu pencapaian sasaran swasembada lima komoditas pangan penting, ketersediaan energy dan protein per kapita (ketersediaan), proporsi penduduk miskin, konsumsi energy dan protein per kapita (keterjangkauan), pencapaian skor Pola

Pangan Harapan (PPH), dan parameter gizi pada anak usia dibawah lima tahun atau balita (pemanfaatan).

Awal masa Pemerintahan KIB Jilid II, pemerintah menargetkan pencapaian swasembada berkelanjutan untuk beras dan jagung, dan pencapaian swasembada kedelai, gula, dan daging sapi pada tahun 2014 (Kementerian Pertanian, 2010). Dalam sidang cabinet terbatas di Bogor pada tanggal 22 Februari 2011, Presiden Republik Indonesia mengubah sasaran swasembada beras berkelanjutan menjadi surplus produksi beras 10 juta ton pada tahun 2014 (Harianto, 2013). Sedangkan untuk gula, sasaran program diperbaharui dari swasembada gula total untuk konsumsi langsung dan bahan baku industri menjadi untuk konsumsi langsung saja (Direktur Jenderal Perkebunan, 2014). Lalu untuk daging sapi, swasembada diartikan pemenuhan 90 persen dari kebutuhan (Menteri Pertanian, 2009).

Keterjangkauan pangan diantaranya ditentukan oleh daya beli. Secara agregat, besarnya masyarakat yang mempunyai daya beli rendah dapat diukur oleh besarnya angka kemiskinan. Jumlah dan proporsi penduduk miskin selama enam tahun terakhir berdasarkan data dari BPS mengalami penurunan, namun penurunannya berjalan lamban. Pada tahun 2013, penduduk miskin di Indonesia sebanyak 28,07 juta jiwa atau sekitar 11,37 persen. Masih besarnya proporsi penduduk miskin menyebabkan rata-rata konsumsi pangan dan gizi masyarakat relatif rendah.

Skor PPH mencerminkan tingkat kualitas konsumsi pangan. Dengan tolok ukur PPH, konsumsi pangan dengan komposisi makanan yang beragam bergizi seimbang sesuai dengan pola konsumsi pangan yang ideal dinilai dengan skor 100. Dari Tabel 3 di bawah, diketahui bahwa skor PPH selama 2009-2013 berfluktuasi pada angka sekitar 80. Skor ini jauh lebih rendah dari sasaran sebesar 95 pada tahun 2015, yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Gambar 1. Konsumsi Energi dan Protein/Kapita/Hari serta Skor Pola Pangan Harapan, 2009-2013

Uraian	Konsumsi/kapita/hari					Standar rekomendasi
	2009	2010	2011	2012	2013	
Energi kkal (%)	1.927 (89,6)	1.926 (89,6)	1.952 (90,8)	1.912 (88,9)	1.937 (90,1)	2.150
Protein gram (%)	54,35 (95,4)	55,05 (96,6)	56,25 (98,7)	53,14 (93,2)	61,70 (108,2)	57,00
Skor PPH	75,7	85,7	85,6	83,5	81,4	95 (sasaran 2015)

Sumber: Susenas 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 BPS, diolah oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian (Suryana, 2014c)

Dari uraian di atas, diketahui bahwa terjadi kesenjangan yang cukup lebar antara rata-rata ketersediaan pangan yang lebih dari cukup dan rata-rata pangan yang benar-benar dikonsumsi masyarakat yang ternyata masih dibawah rekomendasi. Demikian juga dapat disimpulkan ketersediaan pangan yang memadai pada tingkat makro tidak serta merta dapat meningkatkan kualitas konsumsi dan status gizi masyarakat. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah hambatan distribusi, belum tertatanya sistem

logistik pangan, rendahnya daya beli masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola pangan dan gizi yang beragam, bergizi seimbang dan aman, serta terjadinya pemborosan pangan.

## **Tantangan Ketahanan Pangan Berkelanjutan**

### **Penyediaan Pasokan**

Tantangan yang akan dan dihadapi dalam usaha untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan 9 tahun ke depan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tantangan dari sisi penawaran atau penyediaan pasokan pangan dan dari sisi permintaan atau kebutuhan dan pemanfaatan pangan. Dari sisi penyediaan pasokan sendiri ada lima hal yang perlu mendapat perhatian. *Pertama*, kendala sumber daya alam. Kompetisi pemanfaatan lahan termasuk perairan dan air akan semakin tajam karena adanya sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan penduduk dalam presentase dan jumlah yang besar. Kualitas lahan dan air juga makin terdegradasi karena dampak penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang terus menerus digunakan dalam kurun waktu panjang dan limbah industri yang merembes ke lahan pertanian. Selain itu, prasarana pertanian yang sudah ada juga sebagian rusak. Kondisi ini saja sudah akan menurunkan kapasitas produksi pangan nasional, karena produksi pangan Indonesia masih berbasis lahan (*land base*).

*Kedua*, dampak perubahan iklim global. Dalam beberapa tahun terakhir, kejadian iklim ekstrem di Indonesia terasa lebih nyata. Masyarakat mengalami kejadian fenomena iklim ekstrem yang frekuensinya makin sering. Pola dan intensitas curah hujan yang berbeda-beda, kenaikan temperature udara, banjir dan kekeringan yang semakin sering terjadi, dan intensitas serangan hama serta penyakit yang semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dalam proses usaha tani pangan, misalnya penyesuaian waktu tanam, pola tanam, penggunaan varietas yang lebih tahan terhadap cekaman iklim, dan pengelolaan air secara efisien. Pertanian (2011) telah melakukan *review* komprehensif mengenai dampak negative perubahan iklim terhadap produksi berbagai komoditas pertanian melalui beberapa variabel, seperti perubahan pola hujan, suhu udara, dan kenaikan muka air laut. Hasil *review* juga menyimpulkan perubahan iklim global mempunyai dampak negatif terhadap produktivitas berbagai tanaman pangan.

*Ketiga*, pertanian Indonesia dicirikan atau didominasi oleh usaha tani skala kecil. Petani-petani kecil Indonesia ini dihadapkan pada persoalan klasik yang belum berhasil diatasi dengan baik, seperti keterbatasan akses terhadap pasar, permodalan, informasi, dan teknologi. Bila tidak ada rekayasa sosial untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka akan sangat berat bagi Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan.

*Keempat*, adanya ketidakseimbangan produksi pangan antar wilayah. Hampir untuk semua komoditas, proporsi produksi pangan di Jawa lebih dari 50% dari produksi pangan nasional. Ketidakseimbangan ini akan meningkatkan permasalahan upaya pemerataan pangan dan ongkos distribusi pangan hingga mempersulit penyediaan pangan secara spasial merata ke seluruh daerah di Indonesia. Bila tidak dilakukan pembangunan infrastruktur dan sistem logistik pangan antar wilayah, maka akan sulit untuk mengatasi ketidakseimbangan produksi antar wilayah.

*Kelima*, proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih cukup tinggi. Kehilangan pangan (*food losses*) karena ketidaktepatan penanganan pangan mulai dari saat panen sampai dengan pengolahan dan berlanjut pada pemasaran yang dipercayai

masih bergantung pada komoditas, musim, dan teknologi yang digunakan. Sementara itu, pemborosan pangan (*food waste*) yang terjadi mulai pasar konsumen akhir sampai dibawa dan disimpan di rumah, lalu disajikan di meja makan namun tidak dimakan diperkirakan mencapai lebih dari 30 persen. FAO melaporkan sepertiga dari bagian pangan yang dapat dikonsumsi terbuang percuma atau diborosan (FAO, 2011b).

Walaupun sudah lama disadari adanya kehilangan hasil pangan pada saat penanganan dan distribusinya, namun belum ada program pemerintah yang berhasil mengatasinya secara tuntas. Sementara itu, untuk mengatasi persoalan pemborosan pangan diperlukan pemahaman dan kesadaran akan besarnya nilai ekonomi yang dibuang percuma dari para pelaku pada sistem distribusi dan pemasaran, anggota rumah tangga, maupun aparat pemerintah.

### **Pemenuhan Kebutuhan**

Terdapat empat tantangan yang dihadapi dari sisi kebutuhan dan pemanfaatan pangan, antara lain terkait dengan peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan penduduk dan dinamika karakteristik demografis, perubahan selera karena akses terhadap informasi atau promosi pangan global yang sangat tinggi, dan persaingan pemanfaatan bahan pangan. *Pertama*, adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografisnya, diantaranya urbanisasi dan peningkatan proporsi wanita masuk pasar tenaga kerja. Kuantitas atau jumlah kebutuhan pangan setiap tahun akan meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Karena jumlah penduduk yang besar, maka tambahan permintaan pangan per tahun juga akan sangat besar. Urbanisasi yang merupakan salah satu dinamika kependudukan masih akan terus berlanjut dengan alasan dorongan keluar (*push factor*) dari sektor pertanian, karena sektor ini tidak dapat menampung angkatan kerja baru atau tidak dapat memenuhi harapan terkait upah yang diterima atau kondisi kerja dinilai tidak nyaman. Selain urbanisasi, perubahan beberapa daerah yang sebelumnya berciri desa bertransformasi menjadi tempat yang mempunyai karakter kota kecil atau kota sedang akan terus berlangsung seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan otonomi daerah. Kedua faktor inilah yang akan mempercepat peningkatan penduduk kota atau daerah berciri kota. Hal ini akan membawa konsekuensi proporsi pola permintaan pangan berciri preferensi penduduk kota menjadi lebih besar. Partisipasi angkatan kerja wanita juga meningkat. Dalam 9 tahun ke depan diperkirakan akan semakin besar lagi proporsi wanita yang bekerja. Hal ini akan memperkuat peningkatan permintaan untuk makanan jadi, baik yang dimakan di luar rumah maupun di dalam rumah.

*Kedua*, pertumbuhan ekonomi 11 tahun terakhir cukup tinggi di atas rata-rata 5 persen per tahun. Dalam 9 tahun mendatang, sasaran pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut akan terus dipertahankan karena memang negeri ini perlu mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi dari negara-negara yang sudah maju. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita atau daya beli masyarakat, walaupun sebarannya tidak merata ke setiap individu. Situasi ini akan meningkatkan permintaan pangan dari sisi kualitas, keragaman, mutu, dan keamanannya. Salah satu upaya untuk menanganinya dan sekaligus memanfaatkan peluang bisnis pangan olahan adalah melalui penguasaan dan penerapan teknologi pangan agar dapat merespon perubahan permintaan pangan, sehingga mampu menyediakan pangan sesuai dinamika permintaan pasar dan preferensi konsumen dengan baik.

*Ketiga*, pada saat ini sedang berlangsung perubahan selera konsumsi pangan yang mulai meninggalkan pangan lokal dan makanan tradisional. Pola konsumsi pangan

dipengaruhi oleh sumber daya pangan di sekitarnya, daya beli masyarakat, pengetahuan tentang pangan dan gizi, dan selera konsumen. Perubahan selera pangan pada saat ini dibentuk dan dipengaruhi secara kuat oleh perkembangan pesat teknologi informasi media yang dimanfaatkan oleh media promosi / periklanan, termasuk pengiklan yang menjajakan makanan dan minuman yang mencitrakan produknya berlabel tren masa kini, kere, dan global. Iklan televisi dinilai lebih cenderung menawarkan produk yang mencerminkan budaya konsumerisme dan gaya hidup konsumtif.

Dengan semakin tersebarnya jaringan televisi sampai ke pelosok negeri dengan isi iklan pangan yang bersifat persuasif untuk menarik minat dan selera pemirsa yang menawarkan pangan bercitra keren dan global, maka pola konsumsi pangan masyarakat secara perlahan akan bergeser ke arah itu. Makanan bercitra global yang disediakan di restoran, konsumsi makanan cepat saji, makan di luar rumah akan semakin diminati. Sebaliknya, makanan yang berlabel atau diidentikkan dengan makanan tradisional atau lokal secara perlahan akan ditinggalkan konsumen. Pemanfaatan teknologi pangan, teknologi informasi, dan kampanye gerakan cinta pangan lokal Nusantara diharapkan dapat mengimbangi tantangan perubahan selera pangan akibat iklan makanan tersebut.

*Keempat*, persaingan permintaan atas komoditas pangan untuk konsumsi manusia (*food*), pakan ternak (*feed*), bahan baku energy bio (*biofuel*), dan bahan baku industri non-pangan akan terus berlangsung dan semakin ketat dalam 9 tahun ke depan. Persiapan permintaan ini diturunkan dari peningkatan permintaan untuk produk ternak, semakin tingginya harga energy berbahan baku fosil, dan peningkatan permintaan produk industri yang memanfaatkan bahan pangan dalam proses produksinya. Permasalahan ini harus dapat diantisipasi secara arif melalui peningkatan produksi komoditas pangan yang tinggi dan melibatkan industri pangan.

## **Arah Kebijakan Dan Strategi Ketahanan Pangan Berkelanjutan**

### **Alternatif Arah Kebijakan**

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, perlu adanya penyesuaian atau perubahan arah kebijakan yang saat ini diimplementasikan. Perubahan pendekatan arah kebijakan yang disarankan meliputi tujuan, cara, dan sasaran pembangunan ketahanan pangan. *Pertama*, tujuan untuk mencapai swasembada pangan diubah menjadi mencapai kemandirian pangan. Untuk pencapaiannya dilakukan dengan mengabaikan prinsip efisiensi usaha dan kelayakan teknis, ekonomi, ataupun sosial, sehingga dapat terjadi misalokasi sumber daya untuk pembangunan. Dengan pendekatan kemandirian pangan, sesuai arahan UU Pangan, pencapaiannya dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dengan memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal) secara bermartabat.

*Kedua*, cara pencapaian ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan diubah menjadi peningkatan pendapatan petani dan masyarakat pedesaan. Untuk melaksanakan pendekatan ini, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah memberikan tuntunan cara memberdayakan petani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.

*Ketiga*, sasaran pemenuhan pangan konsumsi pangan secara kuantitas diubah menjadi pemenuhan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Pengembangan sumber pangan dan jenis makanan baru yang mempunyai cita rasa, citra, dan harga yang bersaing perlu dilakukan. Di sisi lain, kampanye diversifikasi konsumsi pangan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan B2SA perlu dijadikan gerakan nasional.

Ketiga pendekatan baru untuk menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan, strategi umum pembangunan ketahanan pangan adalah untuk: (1) mengembangkan kapasitas nasional dalam peningkatan produksi pangan secara mandiri dan berkelanjutan; (2) mempromosikan diversifikasi pangan berbasis sumber daya pangan lokal untuk mencapai pola konsumsi pangan B2SA; (3) menyediakan pangan yang cukup dari sisi jumlah, keragaman, kualitas, dan keamanan, dengan tingkat harga terjangkau daya beli masyarakat luas, serta menjaga stabilitas harga pangan pokok; (4) menyediakan pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pendistribusian bantuan pangan atau pangan bersubsidi.

### **Referensi**

- APEC. 2013a. The 21st APEC Economic Leaders' Declaration: Bali Declaration, Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth. 8 October 2013. Bali.
- APEC. 2013b. APEC Food Security Road Map Towards 2020 (version 2013). Policy Partnership on Food Security (PPFS). Indonesian Agency for Food Security, Ministry of Agriculture. Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan. 2013. Capaian dan Tantangan Indonesia dalam Meraih Kondisi Ketahanan Pangan. Disampaikan dalam Focus Group Discussion di Kementerian Luar Negeri. 23 Agustus 2013. Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan. 2014. Situasi Ketersediaan dan Harga Pangan (per Awal April) 2014. Bahan Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian. 7 April 2014. Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2011. Pedoman Umum Perubahan Iklim Pertanian. Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2013a. Produksi Tanaman Pangan, Angka Sementara Tahun 2013. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013b. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi. Jakarta.
- Bappenas. 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010). Jakarta.
- Briones, R.M. 2012. Climate Change and Price Volatility, Can We Count on the ASEAN plus Three Emergency Rice Reserve. ADB Sustainable Development Working Paper Series No. 24. Agustus 2012. Manila.
- Direktorat Pangan dan Pertanian, Bappenas. 2013. Studi Pendahuluan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Pangan dan Pertanian. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2014. Target Produksi Swasembada Gula 2014 Diturunkan.



<http://www.tempo.co/read/news/2012/09/18/090430205/Target-Produksi-Swasembada-Gula-2014-Diturunkan>. Diakses Tanggal 12 September 2014.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum. 2013. 36% Jaringan Irigasi Rusak, Ini Rincian Perbaikan dan Pembangunan PU. <http://industri.bisnis.com/read/20131127/45/189113/36-jaringanirigasi-rusak-ini-rincian-perbaikan-pembangunan-pu> . Diakses Tanggal 7 Mei 2014.

FAO. 2011a. *FAO in the 21st Century, Ensuring Food Security in a Changing World*. Rome.

FAO. 2011b. *Global Food Losses and Food Waste: Extent, Causes and Prevention*. Rome. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Germany. 2011. *The Water, Energy, and Food Security Nexus-Solution for a Green Economy*. Bonn 2011 Conference, 16-18 Nopember 2011. Bonn.

Hariato. 2013. Percepatan Pencapaian Surplus Beras 10 Juta Ton. [www.setkab.go.id/artikel.02](http://www.setkab.go.id/artikel.02) Nopember 2013. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Jakarta.

Hosang, P.R., J. Tatuh, dan J.E.X. Rogi. 2012. Analisis Dampak Perubahan Iklim terhadap Produksi Beras Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2013-2030. *Eugenia* Vol. 18 No. 3, Desember 2012. Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/article/> . Diakses Tanggal 7 Mei 2014.

Imanto, T. 2012. Pengaruh Iklan Televisi dalam Perilaku Gaya Hidup. Jakarta. <http://www.esaunggul.ac.id/article> . Diakses Tanggal 7 Mei 2014. Indonesian Agency for Food Security. 2013.

National Nutrition Strategi Program in Indonesia. Prepared for WHO/WHO Second International Conference on Nutrition (ICN2). Jakarta.

Kementerian Pertanian. 2010. Rencana Strategis. Kementerian. Pertanian 2010-2014 (Permentan Nomor 15 Tahun 2010). Jakarta.

Menteri Pertanian. 2009. Swasembada Daging Sapi 2014. <http://nasional.kompas.com/read/2009/11/09/05381056/swasembada.daging.sapi.2014> . Diakses Tanggal 7 Mei 2014

Peng, S., J. Huang, J.E. Sheehy, R.C. Laza, R.M. Visperas, X. Zhong, G.S. Centeno, G.S. Khush, and K.C. Cassman. 2004. Rice Yields Decline with Higher Night Temperature from Global Warming. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*. Vol. 101 No. 27, July 2004.

RSIS-Nanyang Technological University. 2014. *Toward Asia 2025: Policy and Technology Imperatives*. International Conference on Asian Food Security 2014, 21-13 Agustus 2014. Singapore.

Suryana, A. 2010. Diversifikasi Pangan dalam Upaya Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan. Disampaikan dalam Seminar Diselenggarakan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, 13 Oktober 2010. Jakarta.

Suryana, A. 2012. Cadangan Beras Darurat. *REPUBLIKA*. 29 Agustus 2012. Jakarta.

- Suryana, A. 2013a. Policy Partnership on Food Security (PPFS) Report to C-SOM. Presented at Special Senior Official Meeting (C-SOM) APEC, 2 October 2013. Bali.
- Suryana, A. 2013b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Disampaikan dalam Kuliah Umum Mahasiswa Sarjana dan Pasca Sarjana Jurusan Agribisnis IPB. 14 Desember 2013. Bogor.
- Suryana, A. 2013c. UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Disampaikan dalam Acara Kuliah Umum Mahasiswa FEM-IPB, 13 Nopember 2013. Bogor.
- Suryana, A. 2014a. Food Security Challenges Faced by Developing Asian Countries and Responses toward 2025: The Case of Indonesia. Presented at the 2<sup>nd</sup> International Conference on Asia Food Security. RSIS-Nanyang Technological University. 21-22 August 2014. Singapore.
- Suryana, A. 2014b. Kebijakan Cetak Biru Ketahanan Pangan Nasional. Disampaikan dalam Diskusi Komite Ekonomi Nasional (KEN). 4 Februari 2014. Jakarta.
- Suryana, A. 2014c. Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan dalam Bingkai Anti Korupsi. Disampaikan dalam Pertemuan Komitmen Anti Korupsi untuk Mewujudkan Wilayah Anti Korupsi di Lingkup Kementerian Pertanian. Diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 18 Maret 2014. Yogyakarta.
- Suswono. 2011. Pertemuan AMAF Sepakati Kerja Sama Bidang Strategis. <http://www.antaraneews.com/berita/278796/pertemuan-amafsepakati-kerja-sama-bidang-strategis>. Diakses Tanggal 7 Mei 2014.
- Suswono. 2013. Pengembangan Kelembagaan Petani Kecil untuk Mendukung Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Disampaikan dalam Ambassador Forum: Improving Institution of Smallholder Agriculture. Organized by Institut Pertanian Bogor (IPB), 16 Desember 2013. Bogor.